JURNAL FOKUS MANAJEMEN
p-ISSN 2809-9931
e-ISSN 2809-9141

Accountability, Transparency, and Oversight Effects on Financial Performance at North Labuhanbatu Public Works and Spatial Planning Department

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara

David Rahmat Zulius Hutabarat [1)]; Syahrial Hasanuddin Pohan [2)]; Aulia [3)]
[1),2),3)] *Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi*
Email:[1)] davidhutabarat494@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received [26 September 206]
Revised [04 November 2026]
Accepted [05 November 2026]

KEYWORDS
Accountability, Financial Performance, Local Government, Supervision, Transparency.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pengelolaan keuangan perlu didukung oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 36 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis dilakukan dengan regresi logistik menggunakan IBM SPSS Statistics, disertai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, Omnibus Test of Model Coefficients, Nagelkerke R Square, dan uji Wald pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,251, sedangkan transparansi juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai 0,472. Sebaliknya, pengawasan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 0,036 serta menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Model penelitian dinyatakan layak, dengan nilai Hosmer and Lemeshow sebesar 0,839, Omnibus Test sebesar 0,000, dan Nagelkerke R Square sebesar 0,831. Keterbatasan penelitian terletak pada objek yang hanya mencakup satu instansi dan jumlah responden yang terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan pengawasan, akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan tata kelola keuangan pemerintah daerah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sektor publik selanjutnya. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi sebagai kewajiban administratif belum cukup menghasilkan peningkatan kinerja apabila tidak diikuti mekanisme pengendalian yang konsisten, evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil pengawasan, komitmen organisasi, integritas aparatur, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran.

ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of accountability, transparency, and oversight on financial performance at the Department of Public Works and Spatial Planning of North Labuhanbatu Regency. Local government financial performance is an important indicator of good governance; therefore, financial management needs to be supported by effective accountability, transparency, and oversight. The study employed a quantitative approach with a survey method. Primary data were collected through questionnaires from 36 employees involved in financial management and selected using purposive sampling. The data were analyzed using logistic regression with IBM SPSS Statistics, supported by the Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, Omnibus Test of Model Coefficients, Nagelkerke R Square, and Wald test at a 5% significance level. The results show that accountability has no significant effect on financial performance, with a significance value of 0.251, while transparency also has no significant effect, with a value of 0.472. In contrast, oversight has a positive and significant effect, with a value of 0.036, and is the most dominant factor in improving financial performance. The model is feasible, with Hosmer and Lemeshow at 0.839, Omnibus Test at 0.000, and Nagelkerke R Square at 0.831. The study is limited to one institution and a relatively small number of respondents. These findings provide practical contributions to strengthening oversight, accountability, transparency, employee competence, and local government financial governance, while also serving as a reference for further public sector research. They also indicate that administrative compliance alone requires consistent control, follow-up, organizational commitment, integrity, and budgetary discipline.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang berkualitas akan menghasilkan kinerja keuangan yang optimal sehingga mampu

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu organisasi publik dalam mengelola sumber daya keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi kinerja keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, penggunaan anggaran, serta hasil pelaksanaan program kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat. Penerapan akuntabilitas yang baik diharapkan mampu meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan, mendorong penggunaan anggaran secara tepat sasaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain akuntabilitas, transparansi juga berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Transparansi memberikan jaminan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuan organisasi, serta prinsip efektivitas dan efisiensi. Melalui pengawasan yang efektif, berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalkan sehingga kualitas kinerja keuangan organisasi dapat terus ditingkatkan. Perspektif *Agency Theory*, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi apabila tidak didukung oleh mekanisme pengendalian yang memadai. Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan amanah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, *Stewardship Theory* memandang aparatur pemerintah sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja secara profesional, menjunjung integritas, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam perspektif ini, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengendalian, tetapi juga oleh komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara konseptual, akuntabilitas pada sektor publik tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi mencakup kewajiban aktor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta hasil pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat (Bovens, 2007). Dalam pengelolaan keuangan daerah, kualitas akuntabilitas menjadi semakin penting karena kinerja tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari ketercapaian tujuan, kepatuhan, dan kemampuan organisasi menghasilkan manfaat publik. Studi Budiharjo et al. (2025) menunjukkan bahwa good governance dan pengendalian internal berkaitan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga penguatan pertanggungjawaban perlu disertai mekanisme kontrol yang memadai.

Transparansi juga perlu dipahami sebagai proses penyediaan informasi yang relevan, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Meijer (2009) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dapat memperkuat hubungan antara organisasi publik dan masyarakat ketika informasi disajikan secara bermakna, sedangkan Florini (2007) menempatkan akses informasi sebagai unsur penting dalam pengawasan terhadap organisasi yang mengelola kepentingan publik. Dari sisi pengendalian, COSO (2013) menegaskan pentingnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai komponen yang saling mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam mendukung kinerja keuangan.

Dalam praktik pengelolaan keuangan publik, ketiga prinsip tersebut bekerja dalam satu rangkaian tata kelola yang saling bergantung. Akuntabilitas membutuhkan informasi yang memadai agar pertanggungjawaban dapat dinilai, transparansi membutuhkan mekanisme pengendalian agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya, sedangkan pengawasan memerlukan standar serta bukti yang jelas untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran. Pujiono et al. (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah, sedangkan Mbipi et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan pengendalian anggaran berperan terhadap kinerja perangkat daerah. Di sisi lain, Nareswari dan Budiartha (2021) menemukan bahwa prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dapat mendukung kinerja keuangan. Keragaman hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan tidak selalu berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kualitas implementasi, karakteristik organisasi, dan efektivitas sistem pengendalian. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menguji ketiga variabel tersebut secara empiris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.

p-ISSN 2809-9931
e-ISSN 2809-9141
JURNAL FOKUS MANAJEMEN

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral, administratif, dan profesional aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* mengandung potensi konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Pemerintah memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan keuangan dibandingkan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Oleh karena itu, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian (*governance mechanism*) yang mampu mengurangi *agency problem* melalui penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berbeda dengan Agency Theory, *Stewardship Theory* (Donaldson & Davis, 1991) memandang aparatur pemerintah sebagai individu yang memiliki orientasi kolektif dan berupaya memaksimalkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam perspektif ini, akuntabilitas bukan semata-mata mekanisme pengawasan, melainkan bentuk komitmen profesional aparatur dalam melaksanakan amanah publik secara bertanggung jawab. Aparatur yang memiliki orientasi sebagai *steward* akan terdorong untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal karena keberhasilan organisasi dianggap sebagai keberhasilan pribadi.

Temuan empiris memperkuat argumentasi teoritis tersebut. Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Martio dan Zulvia (2025), yang menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Alviano dan Ayudiati (2024) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal. Selanjutnya, Gultom (2023) menemukan bahwa akuntabilitas berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Kromen et al. (2023) melalui studi literatur menyimpulkan bahwa akuntabilitas secara konseptual merupakan determinan penting dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Lestari (2023) juga membuktikan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu organisasi sektor publik, semakin besar peluang terciptanya pengelolaan keuangan yang berkualitas dan kinerja keuangan yang optimal.

Konsep akuntabilitas juga menuntut adanya forum yang memungkinkan penjelasan, penilaian, dan konsekuensi atas tindakan pihak yang diberi mandat (Bovens, 2007). Dalam konteks keuangan daerah, mekanisme tersebut memperkuat disiplin pertanggungjawaban karena informasi keuangan tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga menjadi dasar evaluasi terhadap capaian dan penggunaan sumber daya. Hasil Budiharjo et al. (2025) memperlihatkan bahwa good governance, pengendalian internal, dan kompetensi memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa akuntabilitas akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan pengendalian dan kompetensi aparatur.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Transparansi bertujuan menciptakan akses informasi yang luas sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang jujur, lengkap, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dalam perspektif *Agency Theory*, transparansi merupakan mekanisme untuk mengurangi *asimetri informasi* antara pemerintah dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin kecil peluang terjadinya moral hazard maupun adverse selection karena masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, transparansi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.

Menurut *Stewardship Theory*, transparansi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk integritas aparatur dalam membangun kepercayaan publik. Aparatur yang memiliki orientasi pelayanan publik akan bersedia membuka informasi secara jujur karena meyakini bahwa keterbukaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan legitimasi organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Astuti et al. (2024) serta

Martio dan Zulvia (2025) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Alviano dan Ayudiati (2024) juga menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal. Gultom (2023) menemukan bahwa transparansi memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Kromen et al. (2023) menyimpulkan bahwa transparansi secara teoritis merupakan salah satu determinan utama kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut diperkuat oleh Lestari (2023), yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, Ferlia (2023) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga mengindikasikan bahwa efektivitas transparansi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, sistem pengendalian internal, serta karakteristik organisasi.

Literatur transparansi menekankan bahwa keterbukaan bukan sekadar banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan juga kualitas, aksesibilitas, dan kemampuan informasi tersebut untuk digunakan dalam proses evaluasi. Hood dan Heald (2006) menunjukkan bahwa transparansi memiliki berbagai bentuk dan dampak yang bergantung pada cara informasi dibuka dan digunakan, sementara Meijer (2009) menekankan bahwa transparansi modern perlu mempertimbangkan hubungan antara keterbukaan dan kepercayaan publik. Secara empiris, Nareswari dan Budiartha (2021) menemukan bahwa prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa transparansi yang efektif membutuhkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang berlaku. Dalam sektor publik, pengawasan berfungsi menjaga kepatuhan terhadap regulasi, mencegah penyimpangan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi. Menurut Mahmudi (2019), pengawasan merupakan proses sistematis untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan korektif. *Agency Theory*, pengawasan merupakan mekanisme *monitoring* yang dirancang untuk mengurangi perilaku oportunistik pemerintah sebagai *agent*. Melalui sistem pengawasan yang efektif, biaya keagenan (*agency costs*) dapat ditekan karena terdapat proses evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Sebaliknya, *Stewardship Theor***y** memandang pengawasan sebagai proses pembinaan yang mendukung aparatur pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan. Pengawasan bukan hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga organisasi mampu mencapai tujuan secara lebih efektif (Donaldson & Davis, 1991).

Temuan empiris mendukung argumentasi tersebut. Gultom (2023) membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian Alviano dan Ayudiati (2024) menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal memperkuat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, pengawasan dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan, meminimalkan penyimpangan, memperkuat akuntabilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan organisasi sektor publik. Oleh karena itu, semakin efektif sistem pengawasan yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan yang efektif berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal. COSO (2013) menempatkan aktivitas pemantauan sebagai salah satu komponen utama pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses organisasi berjalan sesuai tujuan dan kelemahan dapat segera diperbaiki. Pujiono et al. (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Mbipi et al. (2021) menemukan bahwa efektivitas perencanaan dan pengendalian anggaran berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, meskipun transparansi dan akuntabilitas pelaporan tidak selalu menunjukkan pengaruh langsung. Perbedaan temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi pengendalian dalam organisasi.

Jika dipandang secara terpadu, Agency Theory, Stewardship Theory, dan kerangka pengendalian internal memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai kinerja keuangan sektor publik. Agency Theory menekankan perlunya mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan monitoring untuk mengurangi asimetri informasi serta membatasi perilaku oportunistik, sedangkan Stewardship Theory menekankan komitmen, integritas, dan orientasi aparatur terhadap kepentingan organisasi dan masyarakat. Kerangka COSO (2013) memperkuat kedua perspektif tersebut dengan menempatkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai komponen yang harus berjalan secara terpadu. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga sebagai mekanisme yang menyertai proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan. Pada saat yang sama, transparansi perlu diarahkan pada informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, karena keterbukaan yang

tidak relevan atau sulit dipahami belum tentu menghasilkan pengawasan yang efektif (Hood & Heald, 2006; Meijer, 2009).

Keragaman bukti empiris juga menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Budiharjo et al. (2025) menemukan bahwa good governance dan pengendalian internal berhubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara Nareswari dan Budiartha (2021) menunjukkan pengaruh positif prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja keuangan. Namun, Mbipi et al. (2021) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan tidak selalu memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perangkat daerah. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik instansi, kualitas sumber daya manusia, kematangan sistem pengendalian, pola pengawasan, serta tingkat pemanfaatan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, hubungan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan perlu diuji dalam konteks organisasi yang spesifik. Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai variabel mana yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan serta menjelaskan mengapa suatu prinsip tata kelola dapat menunjukkan hasil yang berbeda pada organisasi pemerintah yang berbeda.

Secara operasional, keterkaitan ketiga variabel dapat dilihat dari alur pengelolaan anggaran. Akuntabilitas menyediakan dasar pertanggungjawaban mengenai penggunaan sumber daya dan capaian kegiatan, transparansi memastikan informasi tersebut tersedia bagi pihak yang berkepentingan, sedangkan pengawasan menilai kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil. Bovens (2007) menekankan pentingnya proses pemberian penjelasan dan penilaian dalam akuntabilitas, sementara Florini (2007) menunjukkan bahwa akses terhadap informasi merupakan prasyarat agar pihak di luar organisasi dapat melakukan pengawasan secara bermakna. Kerangka COSO (2013) juga menempatkan informasi, komunikasi, dan pemantauan sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengendalian internal. Oleh karena itu, kelemahan pada salah satu unsur dapat mengurangi efektivitas unsur lainnya. Akuntabilitas tanpa transparansi dapat membatasi kemampuan pemangku kepentingan untuk menilai pertanggungjawaban, sedangkan transparansi tanpa pengawasan dapat menghasilkan keterbukaan informasi tanpa tindak lanjut. Integrasi ketiganya menjadi penting agar tata kelola keuangan tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi benar-benar mendukung pencapaian kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara empiris berdasarkan data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi pegawai yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, maupun pengawasan keuangan pada instansi tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 responden. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan pengawasan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan (Y). Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model melalui Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, Omnibus Test of Model Coefficients, dan Nagelkerke R Square, serta pengujian hipotesis menggunakan uji Wald pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 36 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan pada instansi tersebut. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics dengan

metode regresi logistik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan kualitas data melalui uji validitas dan uji reliabilitas, sehingga seluruh indikator dinyatakan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan model menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, Omnibus Test of Model Coefficients*, serta *Nagelkerke R Square*.

Hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,839, yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan memiliki tingkat kesesuaian (*goodness of fit*) yang baik, sehingga model dinilai mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil *Omnibus Test of Model Coefficients* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun secara keseluruhan mampu menjelaskan hubungan antara variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan, sehingga model penelitian dinyatakan signifikan secara simultan. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,831. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 83,1% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial melalui uji *Wald* menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,251, sehingga lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan positif, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan kinerja keuangan secara statistik. Variabel transparansi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,472, yang juga lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan belum secara langsung mampu meningkatkan kualitas kinerja keuangan pada instansi yang diteliti. Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, pengawasan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,036, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, pengawasan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pengawasan, maka semakin baik pula kinerja keuangan organisasi. Pengawasan menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini karena mampu memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, meningkatkan kepatuhan aparatur, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kedua variabel tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebaliknya, pengawasan terbukti menjadi faktor yang memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Henny Puji Astuti et al. (2024) dan Martio & Dewi Zulvia (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, kualitas implementasi, dan kondisi masing-masing instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan belum secara langsung mampu meningkatkan kualitas kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Henny Puji Astuti et al. (2024), Martio & Dewi Zulvia (2025), dan Maria Laetitia Boliina Kromen et al. (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tias Monika Ferlia (2023) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi saja belum cukup meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan apabila tidak diikuti dengan penguatan sistem pengendalian dan implementasi kebijakan yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pengawasan, semakin baik pula kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pengawasan yang efektif mampu memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Agency Theory, pengawasan merupakan mekanisme pengendalian yang berfungsi memastikan bahwa pemerintah sebagai *agent* menjalankan amanah sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Pengawasan yang efektif mampu mengurangi konflik kepentingan, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sementara itu, menurut Stewardship Theory, pengawasan dipandang sebagai proses pembinaan

JURNAL FOKUS MANAJEMEN
p-ISSN 2809-9931
e-ISSN 2809-9141

yang mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lamtiur Lidia Gultom (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Irenius Alviano dan Citra Ayudiati (2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu memperkuat kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja keuangan karena berfungsi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Hasil	Keputusan
H1	Akuntabilitas → Kinerja Keuangan	Tidak berpengaruh signifikan (Sig. = 0,251)	Ditolak
H2	Transparansi → Kinerja Keuangan	Tidak berpengaruh signifikan (Sig. = 0,472)	Ditolak
H3	Pengawasan → Kinerja Keuangan	Berpengaruh positif dan signifikan (Sig. = 0,036)	Diterima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang diterapkan masih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan, sehingga belum sepenuhnya menjadi instrumen yang mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan. Dalam perspektif Agency Theory, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah sebagai *agent* kepada masyarakat sebagai *principal*. Mekanisme tersebut bertujuan mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme akuntabilitas saja belum cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal yang efektif. itu,

Stewardship Theory menjelaskan bahwa aparatur pemerintah pada dasarnya memiliki orientasi untuk melayani kepentingan masyarakat. Akan tetapi, komitmen tersebut harus didukung oleh lingkungan organisasi yang kondusif agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, akuntabilitas perlu dipahami tidak hanya sebagai kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai budaya kerja yang mendorong integritas, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak hanya memerlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga penguatan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kedua prinsip tersebut belum mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan. Sebaliknya, pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pengawasan, semakin baik pula kinerja keuangan organisasi. Dengan demikian, pengawasan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Saran

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan terus meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui penguatan sistem pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, fungsi pengawasan perlu terus diperkuat melalui evaluasi yang berkelanjutan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan agar kinerja keuangan semakin optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alviano, I., & Ayudiati, C. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi melalui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah.

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jurnal Kajian Pemerintah.

Bovens, M. A. P. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Budiharjo, R., Pratomo, D., & Hapsari, D. W. (2025). Local government financial performance: Good governance, the effectiveness internal control and competence. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 10(1), 125–138. https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.16916

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control—Integrated framework: Executive summary. COSO.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.

Ferlia, T. M. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi kasus BKAD Kabupaten Malang). Jurnal Akuntansi Neraca.

Florini, A. (Ed.). (2007). The right to know: Transparency for an open world. Columbia University Press.

Gultom, L. L. (2023). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia.

Hood, C., & Heald, D. (Eds.). (2006). Transparency: The key to better governance? British Academy.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah (Kajian studi literatur). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.

Lestari, N. A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen.

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.

Martio, & Zulvia, D. (2025). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Jurnal Pendidikan Tambusai.

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503

Meijer, A. J. (2009). Understanding modern transparency. International Review of Administrative Sciences, 75(2), 255–269. https://doi.org/10.1177/0020852309104175

Nareswari, A. A. S. I., & Budiartha, I. K. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi, 31(10), 2621–2635. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i10.p17

Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 10(1), 68–81.